

Hampir Sebulan Akun Medsos TNI AD Dibajak, Ini Kata Kadispennad

JAKARTA (IM) - Akun Twitter resmi TNI Angkatan Darat (AD) @tni_ad dibajak orang tidak dikenal. Unggahan di akun Twitter dipenuhi dengan cuitan dan gambar penguin sejak 25 Agustus 2022.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispennad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, saat ini TNI AD tengah dalam proses meningkatkan keamanan.

“Kami sedang mengubah email yang kami gunakan untuk akun Twitter official, dengan menggunakan email dinas sesuai permintaan pihak Twitter,” kata Hamim, Senin (12/9).

“Karena saat membuka akun dulu kita menggunakan email bukan dinas. (Saat ini) masih dalam proses,” ujarnya.

Hamim berharap, proses dapat selesai pada siang ini, agar Twitter milik TNI AD bisa kembali digunakan. “Ditunggu dulu ya. Saat ini, sedang dalam tahap verifikasi email official. Semoga saja hari ini bisa selesai,” ucapnya.

Untuk diketahui, akun twitter resmi milik TNI AD diduga telah diretas sejak sebulan lalu. Bahkan unggahan terakhir akun @tni_ad pada 25 Agustus 2022.

“Happy Pudygversary! Read more about our additional Pudy Penguins Season 2 Airdrop here: <https://Pudygpeguins.com>,” tulis akun Twitter @tni_ad setelah dibajak, Kamis 25 Agustus 2022. ● me

HUT Ke-77, TNI AL Diharapkan Kian Profesional dan Tangguh

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berharap TNI Angkatan Laut ke depan semakin profesional, modern, dan tangguh. Hal itu disampaikan Yudo usai memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) ke-77 TNI AL di Komplek Satuan Koarmada I, Pondok Dayung, Jakarta Utara, Senin (12/9).

“Kita memiliki kemauan yang kuat untuk memajukan Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh sesuai visi saya waktu awal menjadi KSAL,” ujar Yudo.

Untuk itu, Yudo menambahkan, TNI AL saat ini akan terus membina SDM hingga alat utama sistem persenjataan (alutsista), guna memajukan maritim laut. “Untuk menuju Angkatan Laut yang Jalesveva Jayamaha, di laut kita jaya, di laut kita menang,” imbuhnya.

Dalam upacara HUT ke-77 TNI AL, turut diikuti sejumlah batalyon mulai dari pasukan khusus hingga kompi Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal). Baca juga: Investigasi Jatuhnya Pesawat Latih TNI AL, Panglima Andika Pastikan Transparan Selain itu, sejumlah alutsista juga turut dihadirkan yang meliputi KRI Kurau-865, KRI Bawal-875, dan KRI Dewaruci. ● me

FOTO: ANT



PROGRAM PEMBINAAN KETERAMPILAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo Kurnia Panji Pamekas (kiri) berbincang dengan anak didik pemasyarakatan peserta pelatihan mencukur rambut di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (12/9). Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Pembinaan Keterampilan bagi anak didik pemasyarakatan sebagai bekal keterampilan saat bebas nanti.

Empat Kadis PUPR di Jatim Diperiksa KPK Terkait Korupsi Dana Bantuan Keuangan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) di empat kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, keempat Kadis PUPR itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi bantuan keuangan Pemprov Jatim, Budi Setiawan.

Budi juga diketahui pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur 2014-2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2017-2018.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Surabaya,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (12/9).

Keempat Kadis PUPR itu antara adalah, Kadis PUPR Kota Batu Alfi Nur Hidayat, Kadis PUPR Kota Pasuruan Gustap Purwoko, Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin, dan Kadis PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cobandono.

Selain itu, Yusril pun berpandangan, tanpa swasta

“Tanpa swasta kan susah men-develop IKN ini. Tapi swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan. Dan tentu akan dikerjakan dengan BUMN,” tuturnya.

“Tetapi untuk membangun kawasan permukiman, kawasan komersial supaya Ibu Kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta,” jelas Yusril menambahkan.

Dia pun menjelaskan dari sisi legal formal, memang memungkinkan bagi pihak swasta untuk ikut membangun IKN. Sebab dalam peraturan hukum sudah ada blok-blok yang dipersiapkan Otorita IKN kepada swasta untuk membangun Kota Nusantara.

“Ya sangat memungkinkan dan memang sudah ada blok-blok sudah dipersiapkan oleh otorita yang di mana diserahkan kepada swasta untuk men-develop itu,” tutur Yusril. Sementara itu, dalam

FOTO: ANT



PROGRAM PEMBINAAN KETERAMPILAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo Kurnia Panji Pamekas (kiri) berbincang dengan anak didik pemasyarakatan peserta pelatihan mencukur rambut di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (12/9). Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Pembinaan Keterampilan bagi anak didik pemasyarakatan sebagai bekal keterampilan saat bebas nanti.

Empat Kadis PUPR di Jatim Diperiksa KPK Terkait Korupsi Dana Bantuan Keuangan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) di empat kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, keempat Kadis PUPR itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi bantuan keuangan Pemprov Jatim, Budi Setiawan.

Budi juga diketahui pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur 2014-2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2017-2018.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Surabaya,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (12/9).

Keempat Kadis PUPR itu antara adalah, Kadis PUPR Kota Batu Alfi Nur Hidayat, Kadis PUPR Kota Pasuruan Gustap Purwoko, Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin, dan Kadis PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cobandono.

Selain itu, Yusril pun berpandangan, tanpa swasta

2 Polhukam

FOTO: ANT



KOMNAS HAM SERAHKAN HASIL LAPORAN PENYELIDIKAN KEMATIAN BRIGADIR J

Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) menerima hasil laporan pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kedua kanan) disaksikan Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani (kiri) dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kanan) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9). Berdasarkan laporan yang disusun Komnas HAM bersama Komnas Perempuan disimpulkan terjadi “Extra Judicial Killing” atau pembunuhan di luar hukum yang dilakukan FS terhadap Brigadir J dan adanya tindakan “obstruction of justice” atau penghalangan penegakan hukum yang dilakukan FS.

Kubu Suharso Monoarfa Melawan, Tamliha: Tak Ada yang Bisa Copot Ketum

Mantan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa dipanggil Presiden Jokowi, katanya membicarakan soal konflik di internal PPP dan pembangunan IKN di Kalimantan.

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Saifullah Tamliha mengatakan, pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum menyimpang. Prosesnya tak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamarin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu

Yusril Sebut Kalau BUMN Bangun Ibu Kota Baru Nanti Enggak Jadi-jadi

JAKARTA (IM) - Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, jika badan usaha milik negara (BUMN) yang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), dikhawatirkan selesainya lama.

Penilaian ini disampaikan Yusril usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

“Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yang dibangun oleh pihak swasta dan mereka seperti paham yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau BUMN bangun kota baru nanti enggak jadi-jadi,” kata Yusril.

“Tapi kalau BUMN membangun kompleks pemerintahan itu, memang sudah tugasnya,” tuturnya.

Yusril mengungkapkan, sejak enam bulan lalu pihak swasta sudah banyak yang menyampaikan keinginannya ikut terlibat dalam pengembangan IKN. Hal tersebut pun juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Selain itu, Yusril pun berpandangan, tanpa swasta

ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” tutur Tamliha pada wartawan, Senin (5/9).

Ia memandang, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang menggantikan Suharso dengan Muhammad Mardiono tidak sah.

“Mukernas-nya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART,” katanya.

Namun, Tamliha tak menjelaskan secara rinci ke-

tentuan di dalam AD/ART yang ia sampaikan tersebut.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan pemberhentian Suharso diputuskan berdasarkan hasil Mukernas di Banten, Minggu (4/9). Ia menjelaskan musyawarah dihadiri oleh 30 dari total 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Usulan untuk mengganti Suharso didasari oleh keinginan para kader meningkatkan elektabilitas partai yang dirasa tak optimal di bawah kepemimpinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei PPP

(tidak) meningkat,” paparnya ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9).

“Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” ucapnya. Ia mengklaim Suharso telah mengetahui wacana pemberhentian dan saat ini tengah berkomunikasi untuk ditempatkan pada jabatan lain.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” tandasnya.

Suharso dipanggil Jokowi

Sementara itu, mantan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi), membicarakan soal konflik dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pembangunan ibu kota negara (IKN).

Sayangnya Suharso pun irit bicara ketika ditanya wartawan soal kisruh yang terjadi di internal partai berlabel Kak-bah itu. Dia hanya meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik.

“Ya nantilah kita selesaikan baik-baik, udah udah udah,” kata Suharso di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Sementara terkait posisinya di PPP yang sudah dipecat, Suharso mengaku akan mengurusnya nanti secara baik-baik.

“Saya tadi banyak bicara soal itu (PPP) dan soal IKN ya. Nanti saja, saya selesaikan baik-baik,” kata Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua

Mahfud MD: Kita Harus Optimis Polri Sudah On The Track Tangani Kasus Yosua

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, semua pihak harus optimis, dan berprasangka baik kepada Polri dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Saya kira, kira harus optimis juga, harus punya prasangka baik. Bahwa Polri itu sebenarnya kalau mau jujur kan sudah on the track ya di kasus ini,” kata Mahfud MD kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/9).

Menurut Mahfud hal itu terlihat dari upaya-upaya Polri yang ingin membuat kasus ini menjadi terang benderang. Salah satunya, yaitu dengan membongkar skenario palsu yang dibuat tersangka pembunuhan, Irjen Pol Ferdy Sambo.

Bahkan, Mahfud MD mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup responsif terhadap pendapat masyarakat yang turut memperhatikan pengungkapan kasus.

“Mulai dulu Sambo sampai sebulan mengelak, mengecoh tapi aspirasi masyarakat

Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2020-2025. Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani membenarkan hal tersebut.

Pengesahan tersebut diketahui dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly tertanggal 9 September 2022.

Namun sejumlah pengurus DPP PPP masih mengakui Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Hal ini seperti disampaikan Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.

Analisis politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhtwan Arif mengatakan, pemberhentian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa muatan politisnya tidak begitu kental.

“Keccuali Suharso Monoarfa diberhentikan langsung dari kursi menteri, itu baru muatan politisnya sangat kental,”ujarnya, Senin (12/9).

Dia memberikan saran untuk menghindari terjadinya dualisme dalam tubuh partai, upaya yang harus dilakukan adalah membentuk tim konsolidasi internal partai dengan mempertemukan antara kader partai yang berseberangan pendapat terkait posisi Plt Ketua Umum PPP, ini tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadinya gugatan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Upaya ini kata dia untuk mencegah PPP tidak terjebak dalam konflik internal yang berlanjut dan berdampak pada hasil elektabilitas partai politik yang berimbas pada perolehan hasil suara dan posisi PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). ● han

Mahfud MD: Kita Harus Optimis Polri Sudah On The Track Tangani Kasus Yosua

menghendaki lain karena punya bukti dan logika lain, lalu Kapolri terima itu semua, di-autopsi ulang, ok. Mau dipisah, dikonsongkan dari orang-orang Divisi Protram Duren Tiga, ok,” katanya.

Karena kepolisian sudah berada di jalur yang benar, Mahfud menilai kasus ini pun semakin terang, hingga terjadinya penetapan sejumlah tersangka. “Lalu kemudian pengakuan Bharada muncul, kemudian menetersangkakan Sambo dan kawan-kawan yang kalau ndak salah jumlahnya sekarang sudah 12 ya. Yang pelakunya itu ada lima, yang obstruktion pf justice ada tujuh, yang pidana,” ucapnya.

“Belum lagi yang dipecat karena etik atau didemosi dan ditunda kenaikan pangkatnya kata Mahfud. ● me

PENGUMUMAN
Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan ISAI (Dalam Likuidasi) berkedudukan di Jakarta Timur, yang dimuat dalam Keputusan Pembina tertanggal 12 September 2022, telah diputuskan antara lain:
Menyetujui hasil likuidasi dan menerima laporan pertanggung jawaban likuidator dan memberikan pembebasan pertanggung jawaban sepenuhnya.
Bagi para pihak yang berkepentingan dapat menghubungi secara tertulis di Kantor Yayasan: Jl. Utan Kayu No. 68H, Jakarta Timur.
Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Jakarta, 13 September 2022
Yayasan ISAI



PERINGATAN HUT KE-77 TNI AL DI SURABAYA

Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklat) Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono (kiri) didampingi istri memotong tumpeng saat upacara peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut di Kodiklat, Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/9). Kegiatan yang digelar secara sederhana itu mengangkat tema TNI AL yang Profesional, Modern dan Tangguh Siap Mendukung Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.